

PP No. 33 tahun 2012

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Referring to : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

PP No. 33 tahun 2012

**GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
NUMBER 33 YEAR 2012**

ON

THE EXCLUSIVE BREASTFEEDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering : that to carry out the provisions in Article 129
paragraph (2) of the Act Number 36 Year 2009
on Health Affairs it is deemed necessary to
enact a Government Regulation on the
Exclusive Breastfeeding;

Referring to : 1. Article 5 paragraph (2) of the Constitution
of the Republic of Indonesia Year 1945;
2. Act Number 36 Year 2009 on Health (State
Gazette of the Republic of Indonesia Year
2009 Number 144, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 5063);

HAS RESOLVED:

Establishing : **GOVERNMENT REGULATION ON THE**

PP No. 33 tahun 2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja,

PP No. 33 tahun 2012

EXCLUSIVE BREASTFEEDING

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Article 1

The definitions as referred to in this Government Regulation are as follows:

1. Breast milk, henceforth abbreviated as ASI, is the fluid secreted from the mother's breast glands.
2. Exclusive breast milk, henceforth mentioned as exclusive ASI, is the ASI given to the baby without addition of, and/or replacing with any other food or liquid/drink which is extracted during the time period of 6 months since the baby's birth.
3. Baby is a child from birth (delivery) until the age of 12 (twelve) months.
4. Family is husband, children, or nearest relations in straight line up and down until the third degree.
5. Infant formula is the specifically formulated milk to replace ASI for the baby until the age of 6 months.
6. Health Service Facility is an instrument and/or place used to administer health services activities either of promotive, preventive, curative or rehabilitative nature, conducted by the central- of local government, and/or the society/community.
7. Health officer is each person who has dedicated him/herself in the health services area and who possesses the knowledge and/or skills by way of attained education which for a certain type of health service activity needs the authority to conduct such activity.
8. Work location is an open or closed room or area, movable or immovable/fixed, as the place of work of the officer, or

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.</p> <p>9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:</p> <p>a) menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;</p> <p>b) memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan</p> <p>c) meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.</p> <p style="text-align: center;">BAB II TANGGUNG JAWAB</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah</p>	<p>which is entered frequently by the labor for the purpose of a venture, or where the source or sources of danger occur.</p> <p>9. The Central Government, henceforth mentioned as the Government, is the President of the Republic of Indonesia holding the administrative powers of governing the Republic of Indonesia as referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.</p> <p>10. The Regional Government is the Governor, Regent, or Mayor, and the regional/local government apparatus as components of the local government.</p> <p>11. The Minister is the minister in charge of functional government administration in the health area.</p> <p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>The regulation on the exclusive breastfeeding is aimed:</p> <p>a. To secure the fulfilment of the baby's right to receive exclusive breastfeeding as of the time of birth until the age of 6 (six) months by considering the baby's growth and development.</p> <p>b. To provide protection to the mother in breastfeeding her baby exclusively; and</p> <p>c. To increase the role and support of the family, the society, regional government and the government in administering exclusive breastfeeding.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER II RESPONSIBILITY</p> <p style="text-align: center;">Part One The Responsibility of the Government</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif; b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif; c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya; d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan; e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif; g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif. 	<p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>The responsibility of the government in the exclusive breastfeeding program covers:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to determine the national policy related to the exclusive breastfeeding program; b. to conduct advocacy and socialization of the exclusive breastfeeding program; c. to administer training on the exclusive breastfeeding program and the availability of counsellors in breastfeeding matters at the health service facilities and public areas; d. to integrate the material on exclusive breastfeeding into the formal as well as nonformal education curriculum for health foficers; e. to develop, control, and to evaluate the implementation and attainment of the exclusive breastfeeding program at the health service facilities, the health education units, the work places, public areas, and societal activities; f. to develop the science and technology related to the exclusive breastfeeding; g. to develop cooperation on exclusive breastfeeding program with other parties in domestic and/or international; and h. to grant the availability of access to information and eduction on the administering of exclusive breastfeeding program.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p style="text-align: center;">Part Two The Responsibility of the Provincial Government</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program</p>	<p style="text-align: center;">Article 4</p> <p>The responsibility of the provincial government in the area of</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>pemberian ASI Eksklusif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif; b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi; c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi; d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi; e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi; f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi; g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi. 	<p>exclusive breastfeeding covers:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to execute the national policy on the exclusive breastfeeding program; b. to conduct advocacy and socialization of the exclusive breastfeeding program in provincial scale; c. to render technical training in the form of breastfeeding counseling in provincial scale; d. to make available the counseling staff on breastfeeding at the health service facilities and public areas in provincial scale; e. to develop, monitor, and to evaluate the implementation and attainment of the exclusive breastfeeding program at the health service facilities, the health education units, the work places, public areas, and societal activities in provincial scale; f. to organize, utilize, and monitor the research and development of the exclusive breastfeeding program which supports the formulation of the provincial policy; g. to develop cooperation with the other institutions pursuant to the prevailing legislations; h. to grant the availability of access to information and education on the administering of the exclusive breastfeeding in provincial scale;
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p style="text-align: center;">Part Three The Responsibility of the Regency/Municipal Government</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif; 	<p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>The responsibility of the regency/municipal government in the area of exclusive breastfeeding program covers:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. executing the national policy on the exclusive breastfeeding program;

PP No. 33 tahun 2012

- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.

**BAB III
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.

PP No. 33 tahun 2012

- b. conducting advocacy and socialization regarding the exclusive breastfeeding in regency/municipal scale;
- c. rendering technical training in breastfeeding counseling on a regency/municipal scale;
- d. to provide the counseling staff with the know-how on breastfeeding at the health service facilities and public areas in regency/municipal scale;
- e. to develop, monitor, evaluate and to control the implementation and attainment of the exclusive breastfeeding program at the health service facilities, the work place, public areas, and societal activities in regency/municipal scale;
- f. to organize the research and development of the exclusive breastfeeding program which supports the formulation of the regency/municipal policy;
- g. to develop cooperation with the other institutions pursuant to the prevailing legislations;
- h. to grant the availability of access to information and education on the administering of exclusive breastfeeding in regency/municipal scale;

**CHAPTER III
EXCLUSIVE BREASTMILK**

Part One
General

Article 6

Each mother at delivery shall exclusively breastfeed her baby she has given birth to.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indikasi medis; b. ibu tidak ada; atau c. ibu terpisah dari Bayi. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter. 2. Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 3. Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Inisiasi Menyusu Dini</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam. 2. Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu. <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>The provisions as referred to under Article 6 shall not be valid in case of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. medical indication; b. the absence of the mother; or c. the mother being separated from the Baby. <p style="text-align: center;">Article 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The determination of a medical indication occurs as referred to under Article 7 item a shall be done by a physician. (2) In determining a medical indication as referred to under paragraph (1), the physician shall refer to the professional standards, medical services standards, and the operational procedures standard. (3) In case a certain region does not have a physician, the decision on whether or not a medical indication occurs, can be made by the midwife or nurse pursuant to the prevailing legislations. <p style="text-align: center;">Part Two Initiation for Early Breastfeeding</p> <p style="text-align: center;">Article 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The health officer and the organizer of health services facilities are obliged to conduct initiation for early breastfeeding to the new-born Baby for a minimum period of 1 (one) hour. (2) The initiation for early breastfeeding, as referred to under paragraph (1) is done by putting the baby in the position of prostrating on the chest or stomach of the mother so that its skin touches that of its mother. <p style="text-align: center;">Article 10</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. 2. Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) The health officer and the organizer of health services facilities are obliged to place the mother and the baby in a specific room or joint nursery except if a medical indication occurs which is prescribed by the physicians. (2) The placing in 1 (one) room or joint nursery as referred to under paragraph (1) is meant to facilitate the mother every time she needs to exclusively breastfeed the baby.
<p>Bagian Ketiga Pendonor Air Susu Ibu</p>	<p>Part Three Breastmilk Donor</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>Article 11</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI. 2. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan; b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI; c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI; d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan e. ASI tidak diperjualbelikan. 3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) In case the exclusive breastfeeding is not possible as referred to under Article 6, the exclusive breastfeeding can be conducted by the breastmilk donor. (2) Exclusive breastfeeding by breastmilk donor as referred to under paragraph (1) is conducted under the following pre-conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. at the request of the mother or the family of the respective baby; b. the identity, religion, and the address of the breastmilk donor is eligibly known to the mother or the family of the baby recipient of the other's breastmilk; c. consent of the breastmilk donor after knowing the identity of the baby recipient of the breastmilk. d. The breastmilk donor is in a good health condition and does not have a medical indication as referred to under Article 7; and e. the breastmilk is not commercialized. (3) The breastfeeding as referred to under paragraph (1) and paragraph (2) shall be done pursuant to the religious norms and taking into consideration the socio-cultural aspects, as well as the quality and safety of the breastmilk.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Further provisions on exclusive breastfeeding by breastmilk donor as referred to under paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall be stipulated by a Ministerial Decree.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>1. Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.</p> <p>2. Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.</p>	<p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>(1) Every birth giving mother shall reject the infant formula and/or other baby products which can hamper the efficacy of exclusive breastfeeding for the baby just delivered.</p> <p>(2) In case the delivering mother passes away, or by other reasons would not give her rejection as referred to under paragraph (1), then the rejection can be done by the family.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Informasi dan Edukasi</p>	<p style="text-align: center;">Part Four Information and Education</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>1. Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.</p> <p>2. Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) keuntungan dan keunggulan pemberian ASI; b) gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui; c) akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan d) kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak 	<p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>(1) To achieve optimal results of the utilization of exclusive breastfeeding, the health officer and the organizer of health services facilities have to give information and education on exclusive breastfeeding to the mother and/or the family of the Baby involved as of the date of pregnancy examination until the period of the exclusive breastfeeding is accomplished.</p> <p>(2) The information and education on exclusive breastfeeding as referred to in paragraph (1) at least covers:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the benefit and significance of breastfeeding; b. the mother's nutrition, preparation and enhancing of breastfeeding; c. the negative effects of partial bottle feeding to breastfeeding,

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>memberikan ASI.</p> <p>3. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.</p> <p>4. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1. Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan izin. <p>2. Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis. <p>2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>d. the difficulty in changing the decision to refrain from rendering the breastmilk.</p> <p>(3) The rendering of information and education on the Exclusive Breastfeeding as referred to under paragraph (1) and paragraph (2) can be carried out by means of guidance, counseling and support/accompaniment.</p> <p>(4) The rendering of information and education on the Exclusive Breastfeeding as referred to under paragraph (1) can be done by the specifically trained officer.</p> <p style="text-align: center;">Part Five Administrative Sanctions</p> <p style="text-align: center;">Article 14</p> <p>(1) Each of the health officers which does not fulfills the provisions as referred to under Article 9 paragraph (1), Article 10 paragraph (1), or Article 13 paragraph (1) shall be imposed an administrative sanction by the authoritative official, in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. an oral reprimand b. written reprimand; and/or c. the annulment of permit <p>(2) Each of the organizer of health services facilities which does not fulfills the provisions as referred to under Article 9 paragraph (1), Article 10 paragraph (1), and Article 13 paragraph (1) shall be imposed an administrative sanction by the authoritative official, in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. an oral reprimand; and/or b. written reprimand. <p>(3) The provisions on administrative sanction procedure as referred to under paragraph (1) and paragraph (2) shall be stipulated by a Ministerial Decree.</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER IV THE USE OF INFANT FORMULA AND OTHER BABY PRODUCTS.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.</p>	<p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>In case the exclusive breastfeeding is not possibly done due to consideration as referred to under Article 7, the Baby can be given the infant formula.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.</p>	<p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>In giving the infant formula as referred to under Article 15, the health officer shall give the demonstration and explanation on using and serving the infant formula to the mother and/or the relatives needing infant formula.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 2. Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif. 	<p style="text-align: center;">Article 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Each health officer is prohibited to give the infant formula and/or other baby products which may hamper the exclusive breastfeeding program, except in cases such as referred to under Article 15. (2) Each health officer is prohibited to accept and/or to promote the infant formula and/or other baby products which may hamper the exclusive breastfeeding program.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 	<p style="text-align: center;">Article 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The organizer of health services facilities is prohibited to give the infant formula and/or other baby products which may hamper the exclusive breastfeeding program to the mother and/or the family, except in cases such as referred to under Article 15. (2) The organizer of health services facilities is prohibited to

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>2. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.</p> <p>3. Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.</p> <p>4. (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.</p>	<p>receive and/or to promote the infant formula and/or other baby products which may hamper the exclusive breastfeeding program.</p> <p>(3) In case of disaster happening or emergency, the organizer of health services facilities can receive the infant formula and/or other baby products for humanitarian purposes upon written approval of the Head of the local Regency/Municipal Health Office.</p> <p>(4) The organizer of the health service facilities is prohibited to render the health service on account of the producer or distributor of the infant formula and/or other baby products.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan; b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah; c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual; d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau e) pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang. 	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>The producer or distributor of the infant formula and/or other baby products is prohibited to conduct the following activities which may hamper the exclusive breastfeeding program, in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The distribution of the sample of the infant formula and/or other baby products free of charge or something in any other form to the organizer of the health service facility, the pregnant mother, or the mother just having delivered. b. The directly offering and selling of the infant formula door-to-door; c. The granting of a discount or supplement/increment or something in any other form for the purchase of the infant formula so as to make it a more attractive offer from the seller; d. The use of the health officer to render information on the infant formula to the community; and/or e. The advertising of infant formula in mass media, both print and electronic, and outdoor advertising.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan. 2. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. mendapat persetujuan Menteri; dan b. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI. 	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The provision as referred to under Article 19 item e is excepted if be done in specifically printed media regarding health matters. (2) Exempted as referred to under paragraph (1) can be done after meet the requirements: <ol style="list-style-type: none"> a. upon written approval of The Minister; and b. contain the information that infant formula is not breastmilk substitute
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. 2. Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis. 	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Each health officer, organizer of health service facility, organizer of health education units, professional organizations in health and their family is prohibited to receive gifts and/or assistance from the producer or distributor of the infant formula dan and/or any other baby products which may hamper the success of the exclusive breastfeeding program. (2) The assistance from the producer or distributor of the infant formula, as referred to under paragraph (1) is acceptable only for the purpose of funding the training, research and development, scientific meetings, and/or other similar activities.
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara terbuka; b. tidak bersifat mengikat; c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau 	<p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>The rendering of assistance to cover the costs of training, research and development, scientific meetings, and/or other similar activities as referred to under Article 21 paragraph (2) may be conducted with the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. open management; b. not binding; c. can only be granted through the health service facility, the organizer of health education unit, and/or professional

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>organisasi profesi di bidang kesehatan; dan</p> <p>d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. 2. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. 3. Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. 4. Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. 	<p>organization in health; and</p> <p>d. shall not be exposed using any form of logo or brand of infant formula and/or any other baby product at the time and during ongoing activities which may hamper the exclusive breastfeeding program</p> <p style="text-align: center;">Article 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The health officer accepting the assistance as referred to under Article 21 paragraph (2) is obliged to submit a written statement to his/her superior that such assistance shall not be binding and shall not hamper the success of the exclusive breastfeeding program. (2) The organizer of the health services facility receiving such assistance as referred to under Article 21 paragraph (2) is obliged to submit a written statement to the Minister that such assistance shall not be binding and shall not hamper the success of the exclusive breastfeeding program. (3) The organizer of health education unit receiving such assistance as referred to under Article 21 paragraph (2) is obliged to submit a written statement to the minister in charge of administering the national education that such assistance shall not be binding and shall not hamper the success of the exclusive breastfeeding program. (4) The board of the professional organization in health receiving such assistance as referred to under Article 21 paragraph (2) is obliged to submit a written statement to the Minister that such assistance shall not be binding and shall not hamper the success of the exclusive breastfeeding program.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 24</p> <p>In case the government and/or local government receiving assistance for training costs, research and development, scientific meetings, and/or other similar activities. then the utilization shall conform with the prevailing legislations.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). 2. Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama penerima dan pemberi bantuan; b. tujuan diberikan bantuan; c. jumlah dan jenis bantuan; dan d. jangka waktu pemberian bantuan. 	<p style="text-align: center;">Article 25</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Each producer or distributor of the infant formula and/or other baby products is prohibited to render gifts and/or assistance to the health officers, the organizer of health services facilities, the organizer of health education units, and professional organization in health including their family which may hamper the success of the exclusive breastfeeding program except in circumstances as referred to under Article 21 paragraph (2). (2) Each producer or distributor of the infant formula and/or other baby products who conduct such acts of assistance as referred to under paragraph (1) is obliged to submit a report to the Minister or designated government official. (3) The report as referred to under paragraph (2) shall at the least include: <ol style="list-style-type: none"> a. the name of the giver and the recipient of such assistance; b. the purpose of the assistance; c. the volume and type of assistance; and d. the length of period of assistance.
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan laporan 	<p style="text-align: center;">Article 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) The organizer of health services facilities, the organizer of health education units, and/or the professional organization in health receiving of such assistance as referred to under Article 22 item c is obliged to submit a report to the

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama pemberi dan penerima bantuan; b. tujuan diberikan bantuan; c. jumlah dan jenis bantuan; dan d. jangka waktu pemberian bantuan. <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan izin. 2. Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 	<p>Minister, the related Minister, or designated official.</p> <p>(2) The report as referred to under paragraph (1) shall at the least include:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the name of the giver and the recipient of such assistance; b. the purpose of the assistance; c. the volume and type of assistance; and d. the length of period of assistance. <p style="text-align: center;">Article 27</p> <p>The report as referred to under Article 25 and Article 26 shall be submitted to the Minister, the related Minister, or designated official in the minimum 3 (three) months since the date of acceptance of such assistance.</p> <p style="text-align: center;">Article 28</p> <p>Further provisions of the procedure for use of infant formula and other baby products shall be regulated by the Minister's Regulation.</p> <p style="text-align: center;">Article 29</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Each health officer which does not implement the provisions as referred to under Article 16, Article 17, Article 21 paragraph (1), and Article 23 paragraph (1) shall be levied with an administrative sanction by the authorized official, in the form: <ol style="list-style-type: none"> a. an oral reprimand b. written reprimand; and/or c. the annulment of permit. (2) Each organizer of health service facility, organizer of education unit, board of professional organization in health as well as producer and distribution of infant formula an/other baby products which does not implement the provisions as referred to under 18 paragraph (1), paragraph

PP No. 33 tahun 2012

ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

- 3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 30

- 1. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- 2. Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- 3. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

PP No. 33 tahun 2012

(2), and paragraph (4), Article 19, Article 21 paragraph (1), Article 23 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4), Article 25 paragraph (1) and paragraph (2), and article 26 paragraph (1) shall be levied with an administrative sanction by the authorized official, in the form:

- a. an oral reprimand; and/or
- b. written reprimand.

- (3) The provisions on administrative sanction procedure as referred to under paragraph (1) shall be stipulated by a Ministerial Decree.

CHAPTER V

THE WORK PLACE AND PUBLIC AREAS

Article 30

- (1) The supervisors of the work place and the organizers of public areas shall support the exclusive breastfeeding program.
- (2) The provisions on the support for exclusive breastfeeding program at the work place as referred to under paragraph (1) shall be executed conform to the Company Regulations between the business venture and the employee/labourer or through the Collective Labour Agreement between the labour union/worker union and the entrepreneur.
- (3) The supervisor at the work place and the organizers of public areas shall make available specific facilities to enable breastfeeding and/or breastmilk pumping conform to the conditions within the capacity of the corporation.
- (4) Further provisions on the procedures of providing the specific facilities for breastfeeding and/or breastmilk pumping as referred to under paragraph (3) shall be regulated by the Ministerial Regulations.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perusahaan; dan b. b.perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. 	<p style="text-align: center;">Article 31</p> <p>The work places as referred to under Article 30 are consist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. company; and b. government office, local government office, and private.
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. hotel dan penginapan; c. tempat rekreasi; d. terminal angkutan darat; e. stasiun kereta api; f. bandar udara; g. pelabuhan laut; h. pusat-pusat perbelanjaan; i. gedung olahraga; j. lokasi penampungan pengungsi; dan k. tempat sarana umum lainnya. 	<p style="text-align: center;">Article 32</p> <p>The public areas as referred to under Article 30 include:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. health services facilities; b. hotels and similar accomodations; c. recreational places; d. land transportation terminals; e. train stations; f. airports; g. harbours; h. shopping centres; i. sport buildings; j. replaced person shelters; and k. other public areas.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 	<p style="text-align: center;">Article 33</p> <p>The organizer of public areas such as health services facilities have to support the success of exclusive breastfeeding program referring to the following 10 (ten) steps towards the successful attainment in breastfeeding:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to issue a written policy on breastfeeding and communicate this to all health service staff; b. to train all health service staff to attain the proper skills in order to apply the policy on the exclusive breastfeeding; c. to supply information to all the pregnant mother on the benefits and management (administering) of breastfeeding;

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;</p> <p>e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;</p> <p>f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;</p> <p>g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;</p> <p>h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;</p> <p>i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan</p> <p>j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p>	<p>d. to assist the breastfeeding mother in administering early breastfeeding in the first 60 minutes upon delivery;</p> <p>e. to assists the mother on how to breastfeed and retain breastfeeding although the mother be separated from her baby;</p> <p>f. to only breastfeed her new-born baby except if there occurs medical indications,</p> <p>g. to apply the joint nursery for the mother and her baby unobstructedly during the first 24 (twenty four) hours;</p> <p>h. to recommend breastfeeding according to the baby's needs;</p> <p>i. to refrain from administering the substitute nipple to the baby;</p> <p>j. to stimulate the forming of supportive breastfeeding groups and refer the mother to such a group after being discharged from the health service facility.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Article 34</p> <p>The supervisor at the work place is obliged to render the opportunity to the working mother enabling her for exclusive breastfeeding to the baby or conduct breastmilk pumping during office hours at the work place.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.</p>	<p style="text-align: center;">Article 35</p> <p>The supervisor at the work place and the organizer of the public area are obliged to issue internal company regulation supporting the succesful applicability of the exclusive breastfeeding program.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 36</p> <p>Every supervisor at the work place and/or organizer of the public area which does not implement the provisions as referred to under Article 30 paragraph (1) and paragraph (3), or Article 34 shall be levied with a sanction pursuant to the prevailing legislations.</p>

PP No. 33 tahun 2012

**BAB VI
DUKUNGAN MASYARAKAT**

Pasal 37

1. Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
2. Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
3. Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 38

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 33 tahun 2012

**CHAPTER VI
SUPPORT OF THE COMMUNITY**

Article 37

- (1) The community has to support the successful of exclusive breastfeeding program either individually, in a group, as well as in an organization.
- (2) The support of the community as referred to under paragraph (1) shall be executed by means of:
 - a. the rendering of recommendations related to the policy formulation and/or implementation of the exclusive breastfeeding program;
 - b. the dissemination of information to the society at large related to the exclusive breastfeeding;
 - c. the monitoring and evaluation of the implementation of the exclusive breastfeeding program; and/or
 - d. the provision of time and place for the respective mother to administer exclusive breastfeeding.
- (3) The community support as referred to under paragraph (1) and paragraph (2) shall be executed pursuant to the prevailing legislations.

**CHAPTER VII
FINANCING**

Article 38

The financing of the exclusive breastfeeding program may be generated from the State Budget, the Regional Budget, or any other eligible source pursuant to the prevailing legislations.

PP No. 33 tahun 2012

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 39

1. Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
4. Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

PP No. 33 tahun 2012

**CHAPTER VIII
DEVELOPMENT AND SUPERVISION**

Article 39

- (1) The Minister, the relevant minister, the head of non-ministerial government agency, the governor, and the regent/mayor conduct the development and control over the implementation of the exclusive breastfeeding program, pursuant to its task, function, and authority.
- (2) The development and supervision as referred to under paragraph (1) is intended for:
 - a. increasing the role of the human resources in health, health services facilities, and health education units to support the successful of exclusive breastfeeding program;
 - b. increasing the role and support of the family and the community for the successful of exclusive breastfeeding program;
 - c. increasing the role and support of the supervisor at the work place and the organizers of public areas for the successful of exclusive breastfeeding program.
- (3) The development and supervision as referred to under paragraph (1) is conducted through:
 - a. advocacy, socialization, and enhancement of exclusive breastfeeding;
 - b. training and enhancing the quality of the health officer and the specifically trained officer; and/or
 - c. monitoring and evaluation.
- (4) In conducting the development and supervision as referred to under paragraph (3), The Minister, the relevant minister, the head of non-ministerial government agency the governor, and the regent/mayor can include the community.

PP No. 33 tahun 2012

Pasal 40

1. Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PP No. 33 tahun 2012

Article 40

- (1) The supervision of the infant formula producers or distributors and/or other baby products who advertise for infant formula in mass media, both print and electronic, and outdoor advertising as referred to under Article 19 item e shall be carried out by the agency that performs the government duty in the field of drug and food control.
- (2) Further provisions on the supervision of the infant formula producers and distributors and/or other baby products as referred to under paragraph (1) shall be regulated by the regulation of the head of the agency that performs the government duty in the field of drug and food control.

**CHAPTER IX
TRANSITIONAL PROVISIONS**

Article 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

**CHAPTER X
CLOSING PROVISIONS**

Article 42

At the time this Government Regulation is enacted, all regulations on the exclusive breastfeeding are hereby declared still valid insofar not violating this Government Regulation.

PP No. 33 tahun 2012

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

PP No. 33 tahun 2012

Article 43

This Government Regulation shall be valid as of the day of enactment.

To whom it may be known, hereby instructs the promulgation of this Government Regulation and its announcement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta
on the date of March 1, 2012

**THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Enacted in Jakarta
on the date of March 1, 2012

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>pada tanggal 1 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>AMIR SYAMSUDIN</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 58</p> <p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF</p> <p>I. UMUM Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p>	<p>THE MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,</p> <p>AMIR SYAMSUDIN</p> <p>THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2012 NUMBER 58</p> <p style="text-align: center;">ELUCIDATION ON THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER ... YEAR 2010</p> <p style="text-align: center;">ON</p> <p style="text-align: center;">THE EXCLUSIVE BREASTFEEDING</p> <p>I. General The upgrading of health condition as part of the national development is geared towards enhancement of a more qualifiable human resources condition and is implemented with the purpose of attaining the awareness, willingness and capacity to live a healthy life for each and every citizen hence to increase the health degree of community at the</p>

PP No. 33 tahun 2012

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.

Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1. Menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker

PP No. 33 tahun 2012

farthest.

The indicator for the success of health development is among others the decreasing trend of baby death figures and the increase of the nutritional status of the society at large. Indonesia at the present moment still has to face multi-nutritional problems i.e. the condition where on one side there is still a great number of undernourished population, whereas on the other side the number of people undergoing sufficient nutrition intake shows a rising trend. The issue of multi-facetted nutrition is closely related to the life style of the society and the nutritional behaviour. The nutritional status of the society will be appropriate if the nutritional behaviour can be implemented accordingly at every level or sphere of life including at the stage of babyhood.

The most appropriate pattern of food intake for a baby as of birth up till the age of 2 years covers: (a) the feeding with breastmilk (ASI) to the baby commencing as soon as one hour from birth; (b) the feeding with only ASI from birth to 6 months. Nearly all mothers are able to successfully breastfeed, measured from the beginning of the ASI feeding within the first hour of the baby's life. Breastfeeding reduces the risks of acute infections like diarrhea, pneumonia, ear inflammation, haemophilus influenza, meningitis and urine gland inflammation. Breastfeeding also protects the baby from future chronic diseases such as diabetes type 1. Breastfeeding during the infant stage is correlated with decreasing blood pressure and total serum cholesterol and is related to the prevalence of diabetes type 2 of a lower grade, overweight and obesity at adolescent and adult age. Breastfeeding postpones reinstating the fertility period for a woman and reduces the risk of post-natal

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>payudara, pra menopause dan kanker ovarium; (c) memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan; dan (d) meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.</p> <p>Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya.</p> <p>Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif.</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 	<p>hemorrhage, breast cancer, pre-menopause ovary cancer; (c) to render appropriate ASI food supplement (MP-ASI) as of the the age of 6 months; and (d) to continue the breastfeeding till the child is of 2 years age. The application of such food intake pattern will increase the baby's /child nutritional status and will further impact the respective degree of health.</p> <p>However, at present the best food intake pattern for the baby since its birth until the age of 2 years has not yet been implemented as such, particularly regarding the exclusive breastfeeding scheme. Some constraints in the exclusive breastfeeding administration is that the mother has no self-confidence in that she is capable of healthy breastfeeding hence to fulfill all the baby's nutritional needs. This is caused, among others by the insufficient knowledge of the mother, low support of the family/relatives and the low level of awareness of community on the benefits of the exclusive breastfeeding. Besides that, there occurs a deficient availability of health officers, health services facilities, and baby food producers which therefor impacts the efficacy of a mother to breastfeed her baby.</p> <p>In the framework of protecting, supporting and promoting the exclusive breastfeeding program it is deemed necessary to endeavour to increase the support from the government, the regional government, the health services facilities and the health officers, the society at large as well as the family, in order to enable the mother to administer the exclusive breastfeeding for her baby. For that pupose, a Government Regulation on the exclusive breastfeeding is necessary.</p> <p>The following points are regulated in this Government Regulation:</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Air Susu Ibu Eksklusif; 3. penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; 4. tempat kerja dan tempat sarana umum; 5. dukungan masyarakat; 6. pendanaan; dan 7. pembinaan dan pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The responsibility of the Government, provincial government, and regency/municipal government; 2. Exclusive Breastmilk; 3. The use of infant formula and other baby products; 4. Work place and public areas; 5. Support of the community; 6. Financing; and 7. Development and supervision.
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3</p> <p style="padding-left: 20px;">Huruf a Kebijakan nasional dituangkan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.</p> <p style="padding-left: 20px;">Huruf b Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 20px;">Huruf c Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 20px;">Huruf d</p>	<p>II RESPECTIVE ARTICLES</p> <p>Article 1 Sufficiently clear.</p> <p>Article 2 Sufficiently clear.</p> <p>Article 3</p> <p style="padding-left: 20px;">Item a The national policy is then reflected in the form of norms, standards, procedures, and criteria decreed by the Minister. The strategy of the exclusive breastfeeding program is conducted in an integrated, tier – like and sustainable manner.</p> <p style="padding-left: 20px;">Item b Sufficiently clear.</p> <p style="padding-left: 20px;">Item c Sufficiently clear.</p> <p style="padding-left: 20px;">Item d</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p>	<p>Sufficiently clear.</p> <p>Item e Sufficiently clear.</p> <p>Item f Sufficiently clear.</p> <p>Item g Sufficiently clear.</p> <p>Item h Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Huruf a Dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dengan mengacu pada kebijakan nasional. Dalam menetapkan kebijakan program pemberian ASI Eksklusif di daerah, pemerintah daerah provinsi dapat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan masyarakat. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p>	<p>Article 4</p> <p>Item a In executing the national policy, the provinces can determine regional regulations or regulations of the Governor with reference to the national policy. In determining the policy on the exclusive breastfeeding program in the regions, the regional government may consider the capacity and potential of the human resources, the capacity and potential of the financial resources, and the support of the society. The strategy of the exclusive breastfeeding program is conducted in an integrated, tier – like and sustainable manner.</p> <p>Item b Sufficiently clear.</p> <p>Item c</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Huruf d Cukup jelas.	Item d Sufficiently clear.
Huruf e Cukup jelas.	Item e Sufficiently clear.
Huruf f Cukup jelas.	Item f Sufficiently clear.
Huruf g Cukup jelas.	Item g Sufficiently clear.
Huruf h Cukup jelas.	Item h Sufficiently clear.
Pasal 5	Article 5
Huruf a Dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati atau peraturan walikota dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi. Dalam menetapkan kebijakan program pemberian ASI Eksklusif di daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan masyarakat. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.	Item a In executing the national policy, the district/city can determine regional regulations or regulations of the Regent or regulations of the Mayor with reference to the national policy and the provincial government policy. In determining the policy on the exclusive breastfeeding program in the regions, the regional government may consider the capacity and potential of the human resources, the capacity and potential of the financial resources, and the support of the society. The strategy of the exclusive breastfeeding program is conducted in an integrated, tier – like and sustainable manner.
Huruf b	Item b

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Huruf c Cukup jelas.	Item c Sufficiently clear.
Huruf d Cukup jelas.	Item d Sufficiently clear.
Huruf e Cukup jelas.	Item e Sufficiently clear.
Huruf f Cukup jelas.	Item f Sufficiently clear.
Huruf g Cukup jelas.	Item g Sufficiently clear.
Huruf h Cukup jelas.	Item h Sufficiently clear.
Pasal 6 Cukup jelas.	Article 6 Sufficiently clear.
Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.	Article 7 Item a With ‘medical indication’ is meant the medical condition of the baby and/or the medical condition of the mother, which does not make it possible to administer the exclusive breastfeeding.
Kondisi medis Bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain: a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan	The medical condition of the baby which does not make it possible to administer the exclusive breastfeeding, among others:

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>formula khusus, yaitu Bayi dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi dengan <i>galaktosemia</i> klasik, diperlukan formula khusus bebas <i>galaktosa</i>; 2. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (<i>maple syrup urine disease</i>), diperlukan formula khusus bebas <i>leusin</i>, <i>isoleusin</i>, dan <i>valin</i>; dan/atau 3. Bayi dengan <i>fenilketonuria</i>, dibutuhkan formula khusus bebas <i>fenilalanin</i>, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan. <p>b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah); 2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau 3. Bayi baru lahir yang berisiko <i>hipoglikemia</i> berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan <i>glukosa</i> seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami <i>stress iskemik/intrapartum hipoksia</i> yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung. 	<p>PP No. 33 tahun 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The baby who can only receive milk with specific formula, i.e. the baby bearing the following criteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. the baby infected with classic galaktosemia; needs the specific formula free from galaktosa. 2. the baby infected with the <i>maple syrup urine disease</i>; needs the specific formula which does not contain leusine, isoleusine, and valine. 3. the baby infected with fenilketonuria; needs the specific formula which does not contain fenilalanine, and is being given the opportunity to have breastfeeding several times yet under supervision. b. The baby who needs other food besides ASI for a limited time period, i.e. <ol style="list-style-type: none"> 1. if the weight of the baby at birth is less than 1500 g (birth weight very low); 2. the baby is born less than 32 weeks from the very premature stage of the pregnancy period; and/or 3. the newborn baby bears the risk of hipoglikemia based on metabolism adaptation disorder or the increase of glucose demand as happens to premature babies, small for the respective pregnancy age or which experiences significant hipoksia iscemik/intrapartum stress, sick babies and babies whose mothers are afflicted with diabetes, if the blood

PP No. 33 tahun 2012

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:

- a. ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi Bayi dan demi untuk kepentingan terbaik Bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 1. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat Bayi, misalnya *sepsis* (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 2. infeksi *Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1)* di payudara; kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut Bayi sebaiknya dihindari sampai semua lesi aktif telah diterapi hingga tuntas;

PP No. 33 tahun 2012

sugar fails to response to the breastfeeding be it directly or indirectly.

The medical condition of the mother who cannot breastfeed exclusively because she has to have the medication according to the standards.

The mother's condition consists of among others:

- a. The mother who is justifiable for the reason of not breastfeeding permanently because of being infected with the Human Immunodeficiency Virus. In such a condition, the replacement of breastfeeding should meet the criteria of being acceptable, feasible, affordable, sustainable and safe. The condition may be altered if Exclusive Breastfeeding from the mother who is infected with the Human Immunodeficiency Virus is declared safe technologically for the baby and for the best interest of the baby. The condition can also be applied to other contagious diseases;
- b. The mother who is justifiable for the reason of stopping breastfeeding temporarily because:
 1. a very severe disease obstructing the mother to nurse her baby, e.g. *sepsis* (high fever inflammation resulting in unconsciousness)
 2. *Herpes Simplex Virus* type 1 (HSV-1) infection at the breast; direct contact between a lesion on the breast of the mother and the baby's mouth should preferably be avoided until the active lesion is therapeutically administered totally.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>3. pengobatan ibu:</p> <p>a. obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-epilepsi dan <i>opioid</i> dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;</p> <p>b. <i>radioaktif iodine-131</i> lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;</p> <p>c. penggunaan yodium atau <i>yodofor topikal</i> misalnya <i>povidone-iodine</i> secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada Bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan</p> <p>d. <i>sitotoksik kemoterapi</i> yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.</p>	<p>3. the mother's medication:</p> <p>a) psychotherapeutic medicine of a calming nature, anti-epilepsy medicine, and <i>opioid</i> and its combination which can cause side effects such as feeling sleepy and respiratory depression and should preferably be avoided if there might be a better alternative available.</p> <p>b) radioactive iodine-131 preferably to be avoided bearing in mind that there is a better alternative available-the mother may continue breastfeeding for approximately two months after being administered with this iodine.</p> <p>c) the excessive administering of yodium or topical <i>yodofor</i> such as povidone-iodine, particularly on open lesions or <i>mucosa membrane</i>, may cause pressure on the thyroid hormone or electrolyte deviation to the baby undergoing breastfeeding and as such should be avoided.</p> <p>d) sitotoxic chemotherapy requires that the mother should refrain from breastfeeding during the therapy.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak</p>	<p>Item b</p> <p>The condition which does not enable the baby to get the exclusive breastfeeding because the mother is not present or separated from the baby due to the mother's death, or the mother's whereabouts is not known, or the mother being distantiated from the baby because of natural disasters or other conditions whereby the mother is parted from the baby and therefor disabling</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>memperoleh haknya.</p> <p>Huruf c Lihat penjelasan Pasal 7 huruf b.</p> <p>Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Dalam menentukan ada atau tidaknya indikasi medis, bidan atau perawat mengacu penjelasan Pasal 7.</p> <p>Pasal 9 Ayat (1) Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, Bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p>	<p>her from fulfilling her duty as a mother or disabling the child to get his/her breastfeed rights.</p> <p>Item c See the explanation to Article 7 item b.</p> <p>Article 8 Paragraph (1) Sufficiently clear.</p> <p>Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p>Paragraph (3) In determining a medical indication occurs, the midwife or the nurse shall refer to the explanation of Article 7.</p> <p>Article 9 Paragraph (1) The initiation for early breastfeeding is done under the circumstances whereby the mother's as well as the baby's condition is stable and do not require medical action during a time period of 1 (one) hour at the minimum. The minimum time period 1 (one) hour of early breastfeeding initiation is meant to render the opportunity to the baby to initiate seeking the breast nipple of the mother so that the baby may then commence sucking on its own. In the case that in the minimum 1 (one) hour after birth, the baby still does not want to suck or be breastfed, then the</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p data-bbox="163 375 432 440">Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="102 479 228 505">Pasal 10</p> <p data-bbox="163 513 1037 781">Ayat (1) Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.</p> <p data-bbox="163 889 432 954">Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="102 1027 228 1053">Pasal 11</p> <p data-bbox="163 1062 1037 1192">Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pendonor ASI” adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada Bayi yang bukan anaknya.</p> <p data-bbox="163 1232 432 1297">Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="163 1338 1037 1396">Ayat (3) Yang dimaksud dengan “mutu dan keamanan ASI”</p>	<p data-bbox="1287 240 2007 337">early breastfeeding initiation shall still be endeavoured by the mother, the health officer, and the organizer of the health service facility.</p> <p data-bbox="1213 378 1535 443">Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1140 479 1278 505">Article 10</p> <p data-bbox="1205 513 2007 816">Paragraph (1) With “1 (one) room or joint nursery” is meant an in-patient room where the baby and the mother are placed in one room hence enabling the baby to be within reach of the mother for 24 (twenty four) hours. Medical indication based on medical condition of the baby and/or medical condition of the mother in which joint nursery is not possibly done.</p> <p data-bbox="1213 889 1535 954">Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1140 1027 1278 1053">Article 11</p> <p data-bbox="1213 1062 2007 1159">Paragraph (1) With “breastmilk donor” is meant the mother who gives ASI to the baby who is not hers.</p> <p data-bbox="1213 1200 1535 1265">Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1213 1305 2007 1396">Paragraph (3) With “the quality and safety of the ASI” is meant to cover the hygiene/cleanliness, method of</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p data-bbox="235 240 1039 305">meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara pemberian, atau cara pemerah ASI.</p> <p data-bbox="163 342 348 407">Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="102 444 226 472">Pasal 12</p> <p data-bbox="163 480 1039 613">Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.</p> <p data-bbox="163 651 420 716">Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="102 753 226 781">Pasal 13</p> <p data-bbox="163 789 420 854">Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p data-bbox="163 891 514 992">Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p data-bbox="235 1029 514 1094">Huruf b Cukup jelas.</p> <p data-bbox="235 1131 1039 1330">Huruf c Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.</p> <p data-bbox="235 1367 348 1395">Huruf d</p>	<p data-bbox="1285 240 2007 305">storage, method of administering, or method of pumping the breastmilk.</p> <p data-bbox="1213 342 1528 407">Paragraph (4) Sufficiently clear</p> <p data-bbox="1142 444 1266 472">Article 12</p> <p data-bbox="1213 480 2007 581">Paragraph (1) With “mother” in this provision is meant the mother who can breastfeed her baby exclusively.</p> <p data-bbox="1213 618 1535 683">Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1142 753 1266 781">Article 13</p> <p data-bbox="1213 789 1528 854">Paragraph (1) Sufficiently clear</p> <p data-bbox="1213 891 1598 992">Paragraph (2) Item a Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1285 1029 1598 1094">Item b Sufficiently clear.</p> <p data-bbox="1285 1131 2007 1265">Item c With ‘partial bottle feeding’ is meant the food/drink besides ASI which is given to the baby using a bottle.</p> <p data-bbox="1285 1367 1381 1395">Item d</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.</p> <p>Ayat (3) Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.</p> <p>Pasal 14 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk</p>	<p>With ‘the difficulty in changing the decision’ is meant the condition in which the mother has decided not to give ASI, then it would be hard to give ASI anymore.</p> <p>Paragraph (3) The supportive accompaniment as referred to under this paragraph is done by rendering moral support, guidance, assistance, and supervision to the mother and her baby during the early breastfeeding initiation and/or during the early stage of breastfeeding activities.</p> <p>Paragraph (4) With ‘specifically trained officer’ is meant the worker possessing the knowledge and/or skills related to breastfeeding after having undergone relevant training, among others, breastfeeding counsellors.</p> <p>Article 14 Sufficiently clear.</p> <p>Article 15 Sufficiently clear.</p> <p>Article 16 The administering of demonstration and explanation on the use and serving of the infant formula or other baby milk products can only be done by the health officer. As such, the non paramedic is not allowed to conduct a demonstration and explanation on the use and serving of the infant formula or other baby milk products.</p>

PP No. 33 tahun 2012

susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

PP No. 33 tahun 2012

In case of the mother from the baby who needs the infant formula or other baby milk products has died, suffers a severe illness, in condition of severe mental disorder, and/or the existence is unknown, the administering of demonstration and explanation on the use and serving of the infant formula or other baby milk products can only be done limited to the family who will take care of the baby.

Article 17

Paragraph (1)

With “the other baby products” is meant the baby product which related to lactation activity including all kind of milk and other baby foods, milk bottles, nipples, and pacifiers.

Paragraph (2)

With “Prohibited to be promoted” in this provision including to put it as poster, give discount, distribute samples of the infant formula, distribute gifts, supply information through telephone line, printed and electronic media, use the logo or name of the company on delivery and maternity nursing equipment, print and circulate brochures, leaflets, posters, and similar means of information giving.

Article 18

Sufficiently clear.

Article 19

Sufficiently clear.

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Pasal 20 Cukup jelas.</p>	<p>Article 20 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 21 Cukup jelas.</p>	<p>Article 21 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 22</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “secara terbuka” adalah tidak ada konflik kepentingan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan, dan diumumkan secara terbuka.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “tidak bersifat mengikat” adalah tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh institusi penerima bantuan berdasarkan keinginan pemberi bantuan.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>	<p>Article 22</p> <p>Item a With ‘open management’ is meant there be no conflict of interest between the party extending the assistance and the receiving end of the assistance, and that every transaction be announced in public.</p> <p>Item b With ‘not binding’ is meant there is no such specific obligation to be done by the recipient institution based on the desire of the party rendering the assistance.</p> <p>Item c Sufficiently clear.</p> <p>Item d Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p>	<p>Article 23 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 24 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.</p>	<p>Article 24 With ‘legislations’ in this provision is meant legislation in financial sector.</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Pasal 25 Cukup jelas.</p>	<p>Article 25 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 26 Cukup jelas.</p>	<p>Article 26 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 27 Cukup jelas.</p>	<p>Article 27 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 28 Cukup jelas.</p>	<p>Article 28 Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 29 Cukup jelas.</p>	<p>Article 29 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 30 Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pengurus Tempat Kerja” adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah ruang menyusui dan/atau memerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Article 30 Paragraph (1) With ‘the supervisor at the work place’ in this provision is meant the person having the task to directly supervise a work location or its individual autonomous parts.</p> <p>Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p>Paragraph (3) With ‘specific facilities’ in this provision is meant room for lactating and/or pumping the ASI which is named ‘ruang ASI’.</p> <p>Paragraph (4) Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Article 31</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “perkantoran” termasuk lembaga pemasyarakatan.</p> <p>Pasal 32 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 36 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.</p> <p>Pasal 37 Ayat (1) Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk</p>	<p>Item a With “company” in this provision is as referred to under legislation in labor sector.</p> <p>Item b With “office” is meant including the re-socialization institutes or prisons.</p> <p>Article 32 Sufficiently clear.</p> <p>Article 33 Sufficiently clear.</p> <p>Article 34 Sufficiently clear.</p> <p>Article 35 Sufficiently clear.</p> <p>Article 36 With ‘legislations’ in this provision among other The Health Law.</p> <p>Article 37 Paragraph (1) The implementation of support from the society at large is done conform to the existing respective capacity. The implementation of the societal support is done by virtue of the 10 (ten) Steps Towards</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>masyarakat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan; b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir; c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya; d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI; e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui; f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja; g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun; h. menghormati ibu menyusui di tempat umum; i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui. <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Successful Breastfeeding Program for the Society”, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to request the right to acquire the Early Breastfeeding Initiation upon delivery; b. to request the right to refrain from whatever intake except breastmilk to be given to the newborn baby; c. to request the right for the baby not to be placed separately from the mother; d. to report any violations of the ethical code on the marketing of breastmilk substitute products; e. to support the breastfeeding mother by making available a suitable room for breastfeeding at the work place; f. to create an opportunity for the mother to conduct breastmilk pumping and/or breastfeed her baby at the work place; g. to support the mother to breastfeed her baby at any time and whatever place; h. to respect a mother breastfeeding in a public place; i. to monitor the administering of breastfeeding in the neighbourhood; j. to choose the health 10 (ten) Steps Towards Successful Breastfeeding. <p>Paragraph (2) Sufficiently clear.</p> <p>Paragraph (3) Sufficiently clear.</p>

PP No. 33 tahun 2012	PP No. 33 tahun 2012
<p>Pasal 38 Cukup jelas.</p>	<p>Article 38 Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 39 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada situasi normal dan situasi bencana atau darurat.</p>	<p>Article 39 The development and supervision over the exclusive breastfeeding program is conducted under normal circumstances and in situations of natural disasters or emergency.</p>
<p>Pasal 40 Cukup jelas.</p>	<p>Article 40 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 41 Cukup jelas.</p>	<p>Article 41 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 42 Cukup jelas.</p>	<p>Article 42 Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 43 Cukup jelas.</p>	<p>Article 43 Sufficiently clear.</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5291</p>	<p>SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5291</p>